

Tinjauan Teori Akses dan Ekslusivitas dalam Dinamika Orang-Orang Arab di Indonesia Dari Masa Kerajaan hingga Pemerintah Kolonial

Dawami Zabri Zein
Universitas Gadjah Mada
Corresponding author: dawamisabzein@gmail.com

ABSTRACT

The Arab ethnic group is the largest immigrant minority in Indonesia after the Chinese ethnic group. The presence of Arabs in Indonesia began as early as the 7th century AD, as recorded by various travelers. Their numbers increased significantly during the Islamic Kingdom era, reaching a peak following the opening of the Suez Canal in the late 19th century. As migrants, Arabs had to adapt to their new environment. However, their adaptation efforts were not always smooth. Arabs also faced discrimination, particularly during the Colonial Government era. This study examines Arabs in Indonesia using the Theory of Access to analyze their successful adaptation and the Theory of Exclusion to identify barriers to their adaptation. Through the lens of the Theory of Access, Arabs gained access and successfully adapted by leveraging trade routes, religious dissemination channels, and intermarriage. However, the access they had achieved became threatened during the Colonial Government era, when Arabs were perceived as a threat and became an excluded group.

Keywords: Arabs, Adaptation, Discrimination, Access, Exclusion.

ABSTRAK

Etnis Arab merupakan etnis minoritas pendatang terbesar di Indonesia setelah etnis Tionghoa. Kemunculan orang-orang Arab di Indonesia sudah dimulai sejak awal abad masehi, tepatnya sejak abad ke-7 Masehi melalui catatan-catatan para pengembawa. Sejak era Kerajaan Islam, jumlah mereka semakin meningkat hingga pemuncaknya ketika dibukanya Terusan Suez pada akhir abad ke-20. Sebagai kelompok pendatang, orang-orang Arab harus mampu beradaptasi di wilayah perantauan mereka. Meski demikian, upaya adaptasi mereka tidaklah selalu berjalan mulus. Orang-orang Arab juga mendapatkan perlakuan diskriminasi terutama ketika dimulainya era pemerintah Kolonial. Penelitian ini mengkaji orang-orang Arab di Indonesia dengan menggunakan teori Akses sebagai bentuk keberhasilan adaptasi, serta teori Ekslusivitas sebagai hambatan mereka dalam beradaptasi. Melalui tinjauan teori akses, orang-orang Arab mendapatkan akses dan berhasil beradaptasi dengan memanfaat jalur perdagangan, jalur penyebaran agama, hingga jalur pernikahan. Akses yang sudah mereka miliki menjadi terancam ketika masuk kekuasaan Pemerintah Kolonial dimana orang-orang Arab dianggap sebagai ancaman dan menjadi kelompok yang terekslusiv.

Kata Kunci: Orang-orang Arab, Adaptasi, Diskriminasi Akses, Ekslusivitas.

PENDAHULUAN

Orang-orang Arab yang berada di Indonesia merupakan etnis pendatang minoritas terbesar kedua setelah orang-orang Tionghoa. Eksistensi mereka di Indonesia sudah ada jauh sebelum orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Berdasarkan catatan keberadaan mereka di Indonesia sudah ada sejak abad ke-7 Masehi (Mobini-Kesheh, 2004, p. 17). Posisi mereka pada waktu masih terbatas singgah ke wilayah Sriwijaya guna melakukan praktik hubungan dagang. Praktek hubungan dagang antara orang-orang Arab dengan Indonesia juga dibuktikan bahwa Pemimpin Dinasti Bani Ummayah, Umar Bin Abdul Aziz sudah menjalin kerjasama dengan Raja Sriwijaya. (Fatimi, 1963, p. 136). Hal ini juga diperkuat oleh catatan I-Tsing yang mengatakan pada tahun 671 Masehi ia menumpang kapal milik saudagar Arab dari Kanton, kemudian berlabuh di Pelabuhan Sribuza (Sriwijaya) (Yijing et al., 2000, p. 119). Jumlah orang-orang Arab di Indonesia pada waktu itu belum banyak ditemukan. Mereka baru menetap di Indonesia sejak abad ke-13, dimana sudah ditemukan permukiman orang-orang Arab di sepanjang Pantai Malaka (Mobini-Kesheh, 2004, p. 17).

Sebagai kelompok pendatang, orang-orang Arab dihadapkan dengan persoalan agar dapat bertahan hidup di wilayah yang menjadi perantauan bagi mereka. Dalam hal ini mereka harus mudah beradaptasi untuk mendapatkan kemudahan tinggal di Indonesia. Bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan bermacam-macam. Mulai dari mereka melakukan praktik amalgamasi dikarenakan pada waktu merantau ke Indonesia, orang-orang Arab yang menetap hanya terdiri dari laki-laki, sehingga mereka menikahi perempuan-perempuan lokal. Pada waktu itu mereka terkenal sebagai pedagang yang sukses, sehingga perempuan-perempuan lokal mau dinikahi oleh mereka. Hasil dari pernikahan antara keduanya melahirkan anak peranakan atau keturunan Arab. Orang-orang peranakan atau keturunan Arab inilah yang menjadi mayoritas orang-orang Arab yang ada di Indonesia. Upaya lain agar mereka bertahan hidup di wilayah perantauan, mereka kemudian berusaha menjalin hubungan dagang dengan penduduk lokal, mereka juga berusaha berperan sebagai aktor penyebar agama Islam, hingga berusaha membantu penduduk lokal agar mereka bisa diterima dengan baik.

Orang-orang Arab dalam melakukan upaya-upaya tersebut tidak selalu berjalan mulus. Mereka menghadapi tantangan baik terkait dengan

akses yang diberikan hingga mereka berada dalam kondisi ketika menjadi orang-orang yang ter-marginalkan. Maka dari itu, tulisan ini berfokus menyajikan dinamika orang-orang Arab di Indonesia terutama berkaitan dengan kehidupan sosial mereka dalam melakukan upaya pembauran dengan masyarakat lokal menggunakan *Theory of Access* serta *Theory of Exclusion*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang dirujuk dari tulisan ilmiah baik dari esai, jurnal, makalah, hingga buku-buku pendukung. Dalam penelitian ini juga menggunakan metodologis melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial yaitu antropologi dan sosiologi, dengan merujuk pada teori akses dalam jurnal yang ditulis Jesse Ribot dan Nancy Lee Peluso, serta *Theory of Exclusion* dari buku *Power of Exclusion* karya Derek Hall, Phillip Hirsch, dan Tania Murray Li.

PEMBAHASAN

Tinjauan Penggunaan Teori Akses dalam Aspek Historis kehidupan orang-orang Arab di Indonesia

Sebelum meninjau kehidupan orang-orang Arab di Indonesia melalui teori akses, maka perlu adanya kajian tentang konsep akses secara mendalam. Akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (Ribot & Peluso, 2003, p. 153). Konsep akses dalam hal ini merupakan kumpulan kekuasaan yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya melalui objek material, orang, lembaga, ataupun simbol (Ribot & Peluso, 2003, pp. 153–154). Dalam hal ini, dengan memanfaatkan akses maka orang-orang Arab mampu beradaptasi, atau bahkan justru mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di wilayah perantauan. Dengan memanfaatkan akses, maka orang-orang Arab juga dapat diterima dengan penduduk lokal, bahkan mampu membaur dengan mereka.

Menurut Ribot & Peluso, mekanisme akses terdiri dari beberapa macam yang meliputi; mekanisme akses hukum, mekanisme akses illegal (akses yang kontra dengan hukum), serta mekanisme akses struktural dan relasional (Ribot & Peluso, 2003, pp. 161–164). Pertama-tama saya meninjau mekanisme akses struktural&relasional dalam aspek historis kehidupan orang-orang Arab di Indonesia.

Mekanisme akses struktural&relasional merupakan kemampuan manusia untuk mendapatkan akses melalui faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, serta budaya baik secara struktural maupun secara hubungan sosial yang terbentuk. Dalam hal mekanisme akses struktural, Orang-orang Arab yang berhijrah ke Indonesia, sebagian dari mereka merupakan golongan *saa'dah*. Golongan *saa'dah* merupakan golongan keturunan Nabi Muhammad melalui garis keturunan Fatimah az-Zahra, anak perempuan nabi. Istilah *saa'dah* sendiri merupakan bentuk jamak dari *sayyid* yang berarti tuan (Haikal, 2019, p. 68). Sejak berada di wilayah asal mereka, yaitu Hadhramaut, golongan *sayyid* merupakan kelas sosial tertinggi disana. Mereka diperlakukan istimewa, dihormati karena nasab yang mereka miliki. Golongan ini memperoleh akses pengetahuan agama Islam lebih dalam yang menjadikan sebagai golongan yang dihormati dan diagungkan masyarakat Hadhramaut. Ketika masa kejayaan Kerajaan Islam di Indonesia, mereka memanfaat akses yang mereka miliki sebagai aktor penyebar atau pengajar agama Islam di Indonesia. Mereka berprofesi sebagai pemuka agama (ulama), penasehat raja-raja, serta pedagang yang sukses. Mereka memanfaat legitimasi mereka dan menganggap derajat mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang arab lainnya, serta penduduk lokal. Mereka diyakini sebagai perantara syafaat dari Nabi Muhammad (Alatas, 2007, p. 269). Berdasarkan catatan Schrieke, para orang tua di Madura justru berlomba-lomba untuk menawarkan agar putrinya dinikahi para *sayyid*. Para orang tua tersebut merasa bangga dan menjadi hal yang istimewa jika mendapatkan cucu yang masih memiliki garis keturunan dengan nabi (Jonge, 2019, p. 159).

Sementara itu, dalam mekanisme akses yang bersifat relasional, orang-orang Arab berusaha membangun relasi baik dari segi ekonomi maupun dari segi budaya. Dalam segi ekonomi, mereka aktif membangun hubungan dagang dengan penduduk lokal. ketika Portugis menguasai wilayah Malaka yang menjadi wilayah strategis jalur perdagangan, orang-orang Arab mengalihkan perdagangan mereka menuju wilayah Jawa. Mereka kemudian menjalin kerjasama dagang dengan penduduk lokal, mengislamkan para bangsawan kerajaan, serta menikahi puteri-puteri mereka dengan saudagar Arab. Orang-orang Arab yang menikahi puteri-puteri bangsawan akan memperoleh keuntungan berupa hadiah tanah dari raja, serta menjadi kapten Arab di wilayah tersebut. Mereka juga diberikan tanah perkebunan sebagai bekal hidup hingga keturunannya di masa yang akan datang (Fatiyah, 2016, p. 54). Kedudukannya yang semakin kuat

mampu membuat orang-orang Arab dikenal sebagai pedagang yang sukses. Kemudahan akses melalui relasi ekonomi yang mereka miliki membuat mereka memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi di Indonesia sebagai pengusaha, pemilik toko, atau pemberi pinjaman uang (Jonge, 2019, p. 1). Pada awal abad ke-20 relasi mereka dengan para pedagang lokal semakin menguat dengan dibentuknya organisasi Serikat Dagang Islam (SDI). Organisasi ini dibentuk sebagai respon atas dominasi para pedagang non-muslim. Dalam organisasi SDI, peranan para saudagar Arab melalui bantuan finansial yang diberikannya untuk kegiatan organisasi (Mobini-Kesheh, 2004, p. 21).

Kemudian dalam segi tradisi, orang-orang Arab terutama dari kalangan *sayyid* yang menyebarkan agama Islam, agar ajaran agama diterima oleh penduduk lokal maka mereka berusaha menyebarkan Islam dengan menggunakan pendekatan budaya dan tradisi setempat. Seperti contoh dalam penggunaan bedug dan kentongan yang terdapat di masjid, para ulama Arab sengaja menempatkan bedug dan kentongan di masjid untuk menarik masyarakat agar memasuki masjid. Hal ini karena bedug merupakan tradisi Budha, bahkan menjadi alat penting yang disukai, sementara kentongan “kulkul” merupakan tradisi dari agama Hindu (Sunyoto, 2004, p. 93). Selain itu, orang-orang Arab juga berusaha membuka akses melalui tradisi haul.

Tradisi haul yang sebenarnya berasal dari Hadhramaut dicoba untuk dibawa dan dipraktekkan di Indonesia. Haul sendiri memiliki arti “tahunan” dengan maksud tradisi haul merupakan tradisi tahunan untuk mengenang jasa para *sayyid* serta memohon doa melalui perantara *sayyid* yang dihauulkan. Dalam tradisi mereka meyakini bahwa orang-orang *sayyid* yang dihauulkan dapat menjadi perantara doa kepada Allah serta perantara syafaat dari Nabi (Alatas, 2007, p. 269). Maka dari itu, untuk mempraktekkan tradisi Haul di Indonesia maka orang-orang Arab berusaha untuk berperan dan memberikan jasa kepada penduduk lokal. Bentuk dari peran mereka yaitu membangun perkampungan, membangun masjid, hingga membangun lembaga pendidikan (pesantren). Golongan *sayyid* sangat dihormati oleh penduduk lokal karena garis keturunannya. Mereka yang dianggap penduduk lokal sebagai golongan yang suci, ketika penduduk lokal bertemu dengan golongan *sayyid*, maka mereka mencium tangan dan membungkukkan badannya di hadapan *sayyid* tersebut. Selain itu, jika penduduk lokal memiliki acara atau hajatan tertentu, mereka

mengundang golongan *sayyyid* sebagai penasehat atau pun penceramah.

Tinjauan Penggunaan Teori Ekslusi dalam Aspek Historis kehidupan orang-orang Arab di Indonesia

Dalam bahasan ini akan berfokus pada tinjauan teori ekslusi dalam kehidupan orang-orang Arab di Indonesia, namun sebelumnya perlu diketahui lebih dalam definisi dan maksud dari ekslusi. Ekslusi merupakan proses dimana sekelompok atau individu tidak mendapatkan akses atau dibatasi oleh kelompok yang kuat (Hall et al., 2011, p. 4). Kelompok yang terekslusi dibatasi akses terhadap sumber daya, bahkan tidak mendapatkan hak yang semestinya karena diperlakukan berbeda. Ekslusi yang terjadi dapat meliputi di berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dsb.

Dalam bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana orang-orang Arab mampu mendapatkan akses meskipun merupakan orang-orang pendatang. Akan tetapi, sejak masuknya pemerintah Kolonial, akses yang sudah dimiliki orang-orang Arab terenggut dan mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan menjadi kelompok yang terekslusi sejak berkuasanya orang Eropa di Indonesia.

Sejak pemerintah Kolonial menguasai Indonesia, mereka sedemikian mengekslusikan orang-orang Arab dikarenakan mereka menyebarkan agama Islam. Pemerintah Kolonial juga menganggap orang-orang Arab sebagai ancaman. Hal ini diperkuat dengan tulisan pejabat Belanda sebagai penasehat masalah Islam, Dr. Hazeu, ia menjelaskan bahwa orang-orang Arab sangat berbahaya bagi rakyat pribumi karena sikap religius mereka dianggap sebagai sikap yang intoleran. Ideologi yang dibawah oleh orang-orang Arab yaitu Pan-Islamisme menjadi ancaman bagi pemerintah Kolonial. Kebencian pemerintah terhadap orang-orang Arab juga terlihat karena orang-orang Arab dianggap sebagai dalang perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah Kolonial.

Regulasi yang diterapkan pemerintah Kolonial terhadap orang-orang Arab yang pertama yaitu ketika ditetapkan undang-undang *Wijkenstelsel* pada tahun 1740 dimana pemerintah memisahkan pemukiman antara orang-orang Arab dengan penduduk lokal. Pemisahan yang dilakukan pemerintah pada akhirnya menghambat orang-orang Arab dalam menjalankan bisnis dagang, atau pun interaksi dengan penduduk lokal yang sudah jalan begitu lama. Pada

akhir abad ke-19, ketika menjadi puncak migrasi orang-orang Arab di Indonesia, pemukiman orang-orang Arab menjadi padat dan sesak. Berdasarkan catatan Van den Berg mengatakan bahwa lingkungan di pemukiman orang-orang Arab kumuh, kotor, tak terawat (Jonge, 2019, p. 46).

Selain kebijakan pemisahan pemukiman, orang-orang Arab menjadi terekslusi karena regulasi lain dari pemerintah yaitu *Passenstelsel* atau kebijakan surat jalan. Kebijakan surat jalan berlaku ketika orang-orang Arab akan keluar atau melakukan perjalanan darat maupun laut. Pada surat jalan tersebut tertulis nama pemegang, tempat keberangkatan, tujuan, dan nama-nama kota yang diizinkan untuk berkunjung (Jonge, 2019, p. 47). Regulasi terkait surat jalan ini sangat menghambat mobilisasi orang-orang Arab, bahkan menghambat ekonomi dagang mereka. Hal ini karena untuk mendapatkan surat jalan sangat membutuhkan waktu yang lama. Hal ini juga diperparah dengan diskriminasi rasial yang didapati orang-orang Arab ketika ingin mengajukan surat jalan. Berdasarkan tulisan Snouck Hurgeonje tidak sedikit pegawai negeri sipil karena didorong prasangka rasial, mereka tidak takut menolak memberikan surat jalan kepada orang-orang Arab (Jonge, 2019, p. 49). Pada tahun 1820 hingga 1874 bahkan beberapa wilayah di kota besar Indonesia seperti; Batavia, Bogor, dan Cirebon, akses memasuki wilayah tersebut memerlukan izin tambahan dari pemerintah lokal yang berwenang disana. Pada tahun 1836, wilayah yang memerlukan izin tambahan semakin diperluas hingga ke wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Regulasi yang diterapkan pemerintah Kolonial juga mengakibatkan pada tahun 1913 beberapa pedagang Arab sampai jatuh bangkrut. Dijelaskan bahwasanya pada tahun 1913 sebanyak 27 saudagar Arab bangkrut dan berkewajiban membayar 749.122 gulden (De express, 1913).

Regulasi pemerintah lain untuk meng-ekslusi orang-orang Arab terkait dengan kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal hanya dikhususkan bagi orang-orang Arab saja terutama yang berasal dari Hadhramaut. Pada tahun 1912 diberlakukannya pengendalian terhadap orang-orang Arab, dimana setiap adanya orang-orang Arab yang ingin masuk akan diberhentikan di perbatasan (Jonge, 2019, p. 58). Pada tahun 1918, kebijakan semakin diperketat dengan peraturan yang diizinkan masuk ke Indonesia hanyalah suami dan kerabat dekat sampai tingkatan ketiga dengan syarat telah tinggal di Indonesia selama paling sedikit empat

puluh tahun (Jonge, 2019, p. 58). Berdasarkan teori dalam buku *Powers of Exclusion*, dikatakan bahwa ekslusi dapat dipahami melalui salah satu krangka interaksi yaitu kekerasan (Hall et al., 2011, p. 4). Hal yang sama juga terjadi dan dialami oleh orang-orang Arab. Mulai dari para pedagang, pasangan hidup untuk anak perempuan, calon rekan bisnis, karyawan, bahkan kerabat mereka ada yang ditahan dan diusir dengan kejam (Jonge, 2019, p. 59). Para tamu dari Hadhramaut yang meski loyal terhadap otoritas Belanda ditangkap secara kasar, bahkan beberapa sampai menahan orang-orang Arab dari pulau-pulau tetangga yang ingin berdagang di Jawa (Jonge, 2019, p. 59). Karena hal itu, orang-orang Arab akhirnya melancarkan protes terhadap pemerintah agar peraturan tersebut dihapuskan. Apalagi dirasakan bahwa regulasi yang diatur pemerintah hanya dikhkususkan kepada orang-orang Arab, bukan keseluruhan golongan Timur Asing. Selain itu pers Timur tengah maupun pers Arab lokal mulai memberitakan perlakuan diskriminatif pemerintah Kolonial. Seperti pers *al-mu'ayyad* yang ada di Mesir memaparkan kekejadian Kolonial dan pemerasan yang dilakukan mereka terhadap orang-orang Arab di Indonesia, pers *Thamarat al-Funun* dari Beirut memberitakan perlakuan diskriminatif Belanda terhadap orang-orang Arab, serta pers *servet* dan *al-Ma'lumat* dari Istanbul juga memberitakan hal yang sama (Jonge, 2019, p. 52). Ketidakadilan yang ditujukan kepada orang-orang Arab ternyata juga menimbulkan keprihatinan penduduk lokal. Seperti yang disampaikan oleh para pemimpin Sarekat Islam menyatakan bahwa orang-orang Arab memberikan pengaruh ekonomi yang berbeda dengan orang-orang Tionghoa maupun orang-orang Eropa. Mereka menyatakan bahwa investasi dan dukungan yang diberikan orang-orang Arab bermanfaat bagi penduduk, sedangkan investasi dari orang-orang Eropa justru dikirim ke luar negeri (Jonge, 2019, p. 61).

Regulasi pemerintah Kolonial lainnya yang memberatkan orang-orang Arab dalam hal ekonomi yaitu monopoli terkait pelarangan pembelian produk kopi dari orang-orang Arab. Pemerintah Kolonial mulai memberlakukan bahwa terkait pembelian kopi hanya boleh dibeli dari pedagang Eropa saja. Kebijakan ini dikutip dalam surat kabar *De Preanger-Bode* pada tahun 1923 dijelaskan bahwa pemerintah menganggap apa yang dilakukan orang-orang Arab dalam perdagangan kopi, mereka merusak harga pasar kopi yang dijual oleh para pedagang Eropa. Padahal para pedagang Arab sudah lebih dulu menjual kopi di Indonesia jauh sebelum datangnya orang-orang Eropa. (Syam, 2005, p. 48). Sekitar abad 10, para pedagang Arab yang didominasi oleh

orang-orang Yaman sudah memperdagangkan kopi secara global. Akan tetapi sejak datangnya orang-orang Eropa pada abad ke -17 Masehi, VOC kemudian berusaha memonopoli perdagangan kopi dengan niat ingin meruntuhkan monopoli perdagangan Arab dalam perdagangan kopi dunia (Sugandi, n.d., p. 141).

KESIMPULAN

Setelah mengkaji historis kehidupan orang-orang Arab di Indonesia sejak awal kedatangan mereka ke Indonesia hingga masa pemerintahan Kolonial dengan menggunakan Teori Akses dan Teori Ekslusiv, maka dapat dikatakan bahwa sebelum masa pemerintah Kolonial, orang-orang Arab mampu memanfaat akses meski mereka merupakan kelompok pendatang di Indonesia. Mereka mampu mendapatkan akses melalui mekanisme struktural-relasional, serta mekanisme relasional dari segi ekonomi dan budaya. Akses yang didapat orang-orang Arab melalui mekanisme struktural-relasional melalui praktek amalgamasi dan legitimasi genealogis. Pada praktek amalgamasi mereka memanfaatkan pernikahan dengan para puteri bangsawan kerajaan lokal untuk menaikkan kedudukan mereka, sehingga mereka dapat diterima bahkan dihormati oleh penduduk lokal. Sementara dalam legitimasi genealogis mereka memanfaatkan garis keturunan nabi yang menjadikan seolah-olah derajat atau kedudukan mereka lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal. Di sisi lain, penduduk lokal mengakui bahwa kelompok yang memiliki garis keturunan nabi merupakan golongan orang-orang suci. Sedangkan mekanisme akses yang diraih orang-orang Arab dari segi ekonomi dan budaya terlihat dari praktek dagang yang dilakukan orang-orang Arab membuat terjalannya interaksi dengan penduduk lokal, serta cara orang-orang Arab mendapatkan akses dari segi budaya dengan cara memasukkan kebudayaan mereka ke dalam budaya penduduk lokal (akulterasi budaya). Akan tetapi, sejak kedatangan orang-orang Eropa yang ditandai dengan mulainya kekuasaan pemerintah Kolonial, akses yang sudah diraih orang-orang Arab menjadi terenggut karena regulasi yang diterapkan pemerintah Kolonial yang hanya dikhususkan untuk meng-eksklusifkan orang-orang Arab. Peng-ekslusian orang-orang Arab oleh pemerintah Kolonial terlihat ketika mereka memisahkan tempat tinggal orang-orang Arab dengan penduduk lokal melalui kebijakan *wijkenstelsel* (pemisahan tempat tinggal berdasarkan kelas), kemudian kebijakan *passenstelsel* yaitu kebijakan surat jalan yang membatasi akses orang-orang Arab untuk mobilitas perdagangannya, serta

Candi:

Jurnal Penelitian & Pendidikan Sejarah
Volume 25 Nomor 1, 2025, 41-51
ISSN: 2086-2717

History Education

Study Program
Universitas
Sebelas Maret

monopoli dagang yang melarang penduduk lokal membeli barang dari para pedagang Arab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, I. F. (2007). THE UPSURGE OF MEMORY IN THE CASE OF HAUL: A Problem of Islamic Historiography in Indonesia. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 1(2), 267.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.2.267-279>
- Fatimi, S. Q. A. (1963). *Two Letters from the Maharaja to the Khalifah: A Study in the Early History of Islam in the East*. publisher not identified. <https://books.google.co.id/books?id=D5PWnQEACAAJ>
- Haikal, H. (2019). *Indonesia-Arab dalam pergerakan kemerdekaan*. Forum.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. (2011). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. NUS Press.
- Jonge, H. de. (2019). *Mencari identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia* (C. M. Udiani, Ed.; A. B. Prasetyo, Trans.; Cetakan pertama). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mobini-Kesheh, N. (2004). *The Hadhrami awakening: Community and identity in the Netherlands East Indies, 1900 - 1942* (Reprint). Southeast Asia Program Publications.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access*. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
<https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Sugandi, R. (n.d.). *CULTUURSTELSEL KOPI MANDAILING: Dampak Terhadap Pembangunan Jalan Lintas Natal*.
- Sunyoto, A. (2004). *Sunan Ampel, raja Surabaya: Membaca kembali dinamika perjuangan dakwah Islam di Jawa abad XIV-XV M* (Cet. 1). Kerjasama Diantama [dengan] Lembaga Pengajaran Bahasa Arab, Mesjid Agung Sunan Ampel (LPBA-MASA), Surabaya.
- Syam, N. (2005). *Islam pesisir* (Cet. 1). LKiS : Distribusi, LKiS Pelangi Aksara.

Candi:

Jurnal Penelitian & Pendidikan Sejarah
Volume 25 Nomor 1, 2025, 41-51
ISSN: 2086-2717

History Education

Study Program
Universitas
Sebelas Maret

Yijing, Li, R., Yijing, & Yijing. (2000). *Buddhist monastic traditions of Southern Asia: A record of the inner law sent home from the South Seas* (1. print). Numata Center for Buddhist Translation and Research.